

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai rencana. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan guna mencapai visi dan misi.

Bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dihimpun dari berbagai sumber baik dari beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan dari sumber lainnya. Mengingat masih banyak kendala dan berbagai keterbatasan dalam penyusunan ini, yang mengakibatkan terdapat berbagai kekurangan didalamnya, maka kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan.

Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan terima kasih. Akhirnya, dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025 dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dipedomani.

Palembang, 13 Februari 2026


Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan
DINAS
PERDAGANGAN
HENNY YULIANTI, S.IP, MM
Rambina Tk. I – IV.b
NIP. 197907082006042005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1. Gambaran Umum	5
I.2. Aspek Strategis	6
I.3. Struktur Organisasi	6
1.3.1 Profil Organisasi	14
1.3.2 Sarana dan Prasarana	17
I.4 Maksud dan Tujuan	19
I.5 Permasalahan	19
I.6 Hasil yang Diharapkan	21
I.7 Sistematika Penyusunan	22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 23
II.1 Rencana Strategis	23
II.2. Visi dan Misi	24
II.3 Tujuan dan Sasaran	25
II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
1. Capaian IKU	32
2. Analisis Capaian Kinerja	32
B. Realisasi Anggaran	36
 BAB IV PENUTUP	 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	15
Tabel 2	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 3	Daftar Aset Barang Tidak Bergerak Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	17
Tabel 4	Daftar Aset Barang Bergerak Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	18
Tabel 5	Tujuan-Sasaran-Indikator-Target Kinerja Tahun 2025-2029	25
Tabel 6	Rencana Kinerja Tahun 2025	26
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 8	Program dan Kegiatan Tahun 2025	27
Tabel 9	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 10	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	32
Tabel 11	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi	33
Tabel 12	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	33
Tabel 13	Capaian Anggaran Program Kegiatan APBD	36
Tabel 14	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 dan 2025	62
Tabel 15	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	63
Tabel 16	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi	8
Gambar 2	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Gambar 3	Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan	16
Gambar 4	Grafik Realisasi Keuangan Tahun 2024 dan 2025	62
Gambar 5	Grafik Realisasi Fisik Tahun 2024 dan 2025	63

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP bagi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Sumatera Selatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan straregis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang telah dilaksanakan.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

I.2 Aspek Strategis

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, dalam rangka terwujudnya perdagangan yang efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Dinas Perdagangan dalam mewujudkan perdagangan yang efisien baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dapat tercapai dengan didukung program kegiatan dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, menempatkan Dinas Perdagangan sebagai Perangkat Daerah yang strategis dalam lingkungan pemerintahan khususnya di sektor perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 31 Desember 2025 memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 148 orang, seperti terlihat pada tabel berikut :

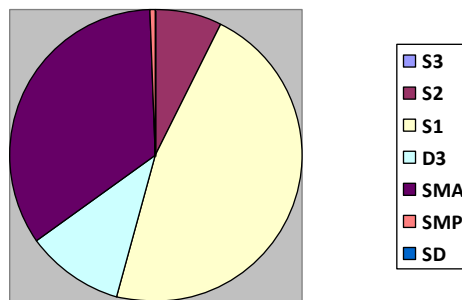
Tabel 1
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Jumlah	Keterangan
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	37 orang	
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	110 orang	
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu	1 orang	
Jumlah	148 orang	

Tabel 2.
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jumlah Total Pegawai	Jenis Kelamin Pria	Jenis Kelamin Wanita
Sekretariat	32 orang	13 orang	19 orang
Bidang PDN	29 orang	14 orang	15 orang
Bidang PLN	32 orang	13 orang	18 orang
Bidang PKTN	24 orang	17 orang	8 orang
UPTD BPSMB	31 orang	17 orang	14 orang
Jumlah	148 orang	74 orang	74 orang

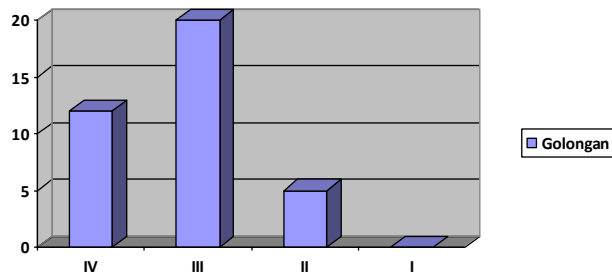
Gambar 2
Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan



Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

- S3	:	0 orang
- S2	:	11 orang
- S1	:	69 orang
- D3	:	16 orang
- SMA	:	51 orang
- SMP	:	1 orang
- SD	:	- orang

Gambar 3
Komposisi ASN berdasarkan Golongan



Komposisi pegawai berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 12 orang
- Golongan III : 20 orang
- Golongan II : 5 orang
- Golongan I : - orang

Dilihat dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa jumlah terbesar personil ASN yang ada adalah Golongan III sebanyak 20 orang, jika dilihat dari tingkat pendidikan masih ada yang latar belakang pendidikannya SMP.

Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum sebanding dengan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual.

Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Perdagangan baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional sampai Desember 2025 adalah :

a. Pejabat Struktural

Jabatan Struktural berjumlah 20 orang, terdiri dari :

- 1 eselon II A
- 5 eselon III A
- 14 eselon IV A

b. Pejabat Fungsional

Pejabat fungsional pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda : 3 orang
- Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Madya : 1 orang
- Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Madya : 0 orang
- Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda : 1 orang
- Fungsional Analis Perdagangan Ahli Madya : 0 orang
- Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda : 1 orang

Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3. Daftar Aset Barang Tidak Bergerak
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Jenis/Macam Barang	Satuan M ² /Buah	Alamat
I.	Tanah, Bangunan Kantor		
1.	Tanah, Bangunan Kantor, Kantor UPTD BPSMB	43,484 M ²	Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang
2.	Tanah, Bangunan Kantor, Gudang Metrologi	535 M ²	Jl. H.M Nurdin Panji Kel. Karya Baru
II.	Tanah, Bangunan Rumah		
1.	Tanah, Bangunan Rumah	777 M ²	Jl. Kapten A. Rivai No. 94 Kel. 26 Ilir Palembang
2.	Tanah, Bangunan Rumah	228 M ²	Jl. AKBP Cek Agus No. 5 Kel. 8 Ilir Palembang
3.	Tanah, Bangunan Rumah	1008 M ²	Jl. Murai No. 532, 533 Kel. 9 Ilir Palembang
4.	Tanah, Bangunan Rumah	225 M ²	Jl. AKBP H. Umar Lrg. Ario Baru 125, 126 Kel. Ario Kemuning Palembang

5.	Tanah, Bangunan Rumah	3581 M ²	Jl. Tanjung Siapi-api Desa Muara Sunsang Kec.Banyuasin II Kab. Banyuasin
6.	Pilar/tugu/tanda lainnya	2 buah	Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang

Tabel 4. Daftar Aset Barang Bergerak
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Jenis/Macam Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	12 unit	Kendaraan Roda Empat tersebut diperuntukkan sebagai kendaraan operasional: - 10 unit kendaraan operasional Dinas Perdagangan. - 2 unit kendaraan operasional UPTD BPSMB.
2.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	5 unit	Kendaraan operasional roda 5 (lima) diperuntukkan untuk Dinas Perdagangan
3.	Peralatan Kantor :		
	- PC Unit/Komputer	25 unit	- 15 unit pada Bidang - 10 unit pada Sekretariat
	- Note Book/Laptop	5 unit	- 5 unit pada SEKRETARIAT
	- Printer	20 Unit	
	- Meja Kerja	118 buah	
	- Kursi Kerja	117 Buah	
	- Kursi Besi/Bangku Tunggu	3 Unit	
	- Sofa	8 Set	
	- Meja Resepsionis	1 Unit	
	- AC	20 Unit	Terdiri dari AC Split dan AC Window
	- Pompa Air	3 Unit	
	- CCTV-Camera Control Television System	1 Paket	
	- Wireless	1 Buah	
	- Mesin Penghancur Kertas	6 Buah	

- Kulkas 1 Pintu	5 Buah	
- Kulkas 2 Pintu	1 Unit	
- Filling Cabinet	17 Set	
- Faximilie	1 Set	
- LCD Projector/Infocus	2 Buah	
- Lemari Arsip	7 Buah	
- Camera Elektronik	1 Pake t	
- Televisi	5 Unit	
- Dispenser	5 Unit	
- Gorden/Kray	2 Sett	
- Alat Pemadam Kebakaran	3 Buah	

I.3. Struktur Organisasi

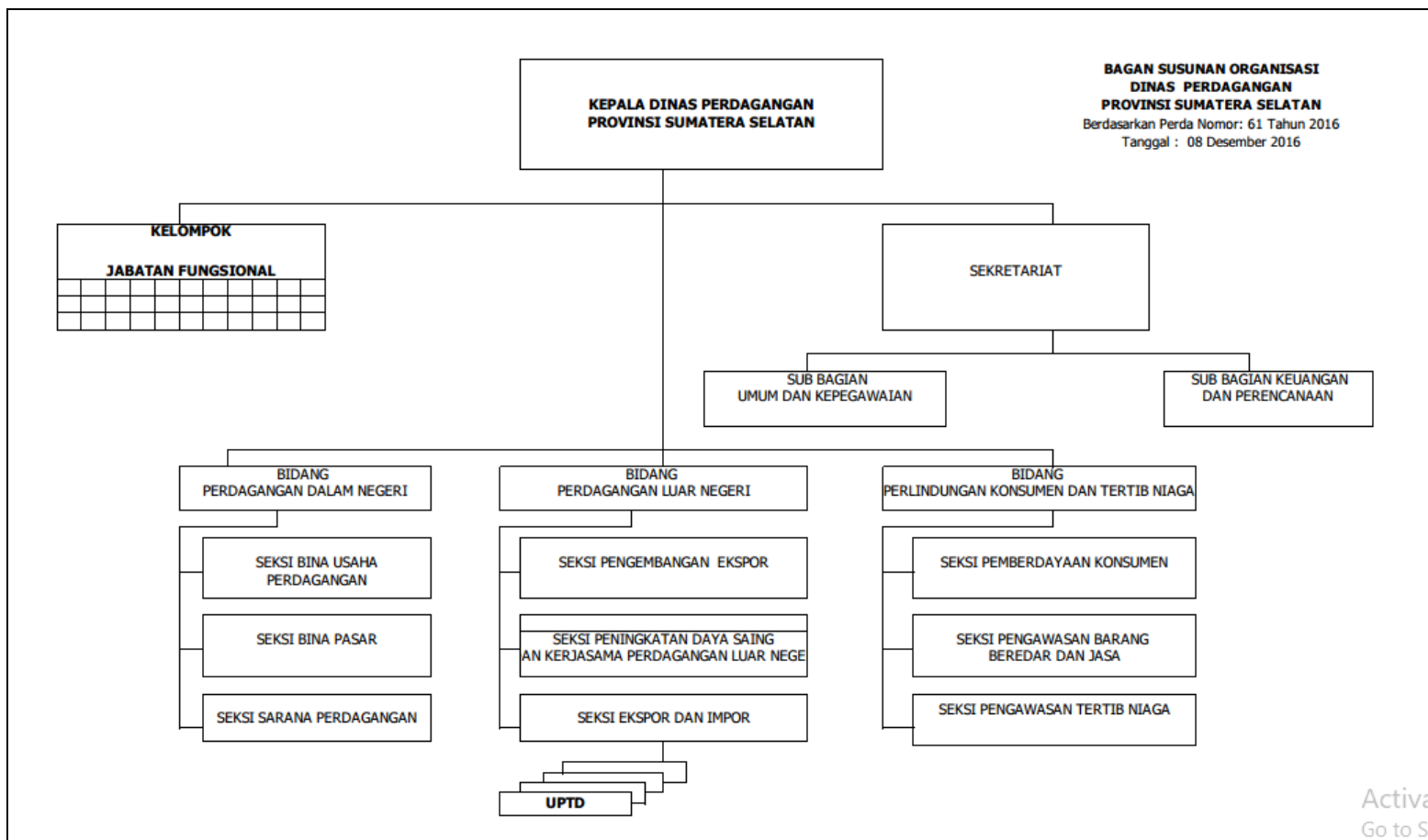
Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Subbagian Keuangan dan Perencanaan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - 2) Seksi Bina Pasar
 - 3) Seksi Sarana Perdagangan
- d. Bidang Perdagangan Luar Negeri yang membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Ekspor
 - 2) Seksi Peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
 - 3) Seksi Ekspor dan Impor
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Konsumen
 - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - 3) Seksi Pengawasan Tertib Niaga

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) UPTD, yaitu :
1. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - 1) Kepala UPTD
 - 2) Subbagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pengujian dan Sertifikasi
 - 4) Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan



Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah : ***“melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan”***.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan;
3. Penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
4. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah Provinsi;
5. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
8. Pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetrollogian dan tertib niaga;
9. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
10. Pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan humas;
11. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Selain dari uraian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61

Tahun 2016 juga mengatur tugas pokok dan fungsi pejabat pejabat eselon II dan III seperti diuraikan sebagai berikut :

2. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, sedangkan fungsinya sebagai berikut adalah :

- a. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. Penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah Provinsi;
- e. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
- h. Pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetrolagian dan tertib niaga;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan humas;
- k. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana dan program, penyusunan dan evaluasi, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian serta keuangan, sedangkan fungsinya :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, organisasi dan tatalaksana; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Kabupaten/Kota;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

- h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha Bidang;
- b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor impor serta pengawasan mutu barang ekspor;
- c. Penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan daya saing dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- c. Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar,

barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;

- e. Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk memperkuat Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 yaitu : **Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB)** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan di bidang standarisasi dan pengawasan mutu barang;
- b. Menyusun dan mengembangkan sistem jaminan mutu untuk mencapai pemenuhan Standar Internasional (ISO-IEC 17025) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium;
- c. Melaksanakan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- d. Melaksanakan pengawasan mutu produk bertanda SNI;
- e. Melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi produk penggunaan tanda SNI;
- f. Melaksanakan pengawasan mutu barang yang beredar dipasaran baik produk dalam negeri maupun eks impor dalam rangka perlindungan konsumen;
- g. Melakukan pengawasan produk impor dalam rangka perlindungan produk lokal;
- h. Melaksanakan pengembangan serta penyusunan standar dan metode pengujian;
- i. Melaksanakan pelayanan jasa di bidang standarisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis pada dunia usaha dan masyarakat;
- j. Melaksanakan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;

- k. Memberikan bimbingan teknis di bidang mutu kepada dunia usaha dan masyarakat;
- l. Melaksanakan pelatihan di bidang teknis pengujian dan kalibrasi;
- m. Memberikan bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
- n. Melakukan pengolahan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
- o. Melakukan kegiatan analisa dan evaluasi data hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian dan Sertifikasi
- d. Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

Tujuannya untuk mengukur Tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Dinas sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan memberikan arah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

I.5. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengembangan di sektor perdagangan, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Kendala tersebut ada yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Internal

- a. Pemahaman SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi OPD masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja pelayanan publik.
- b. Tugas pokok dan fungsi OPD yang dalam pendistribusiannya sudah dibagi per SDM aparatur masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar SDM aparatur mengerti tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- c. Kemajuan teknologi aplikasi yang saat ini telah diimplementasikan ke dalam proses perencanaan, keuangan maupun pelaporan tidak diimbangi dengan penyediaan aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
- d. Belum terealisasinya secara baik pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik atau SOP (Standart Operation Procedure) di lingkungan OPD.
- e. Masih kurangnya kesempatan bagi SDM aparatur dalam meningkatkan kemampuan/kompetensinya terutama bagi SDM aparatur pembina di bidang teknis.
- f. Validasi dan ketersediaan data & informasi masih belum lengkap dan tertata dengan baik.
- g. Masih rendahnya aksi SDM aparatur dalam menyikapi isu-isu strategis saat ini seperti GRK (go green), MDG's, Gender dan pengentasan kemiskinan, terutama pada implementasinya ke dalam program- kegiatan OPD.

b. Eksternal

- a) Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal disamping produk-produk ekspor banyak tergantung pada musim.

- b) Masih sedikitnya jumlah industri hilir bagi komoditi unggulan Sumatera Selatan yang berorientasi ekspor.
- c) Belum tersedianya pelabuhan laut beserta infrastrukturnya yang memadai, sehingga untuk komoditi tertentu banyak dikapalkan melalui Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung, hal ini berdampak terhadap nilai ekspor Sumsel.
- d) Kurangnya informasi di luar negeri (akses pasar) untuk produk industri yang berpotensi ekspor, umumnya masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.

I.6. Hasil yang diharapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga LKjIP ini diharapkan :

1. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai capaian kinerja organisasi, yaitu sejauh mana hasil pengukuran kinerja dilakukan selama satu tahun anggaran;
2. Dapat digunakan untuk menjawab implementasi rencana strategis lima tahunan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, yakni mengetahui sejauh mana tahun demi tahun rencana strategis tersebut dijalankan;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
4. Sebagai upaya yang berkesinambungan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

I.7 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah :

I. PENDAHULUAN

- I.1. Gambaran Umum
- I.2. Aspek Strategis
- I.3. Struktur Organisasi
- I.4. Maksud dan Tujuan
- I.5. Permasalahan
- I.6. Hasil yang diharapkan
- I.7. Sistematika Penyusunan

II. PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Rencana Strategis
- II.2 Visi dan Misi
- II.3 Tujuan dan Sasaran
- II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian IKU
 - 2. Analisis Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam bentuk rencana tiga tahunan dengan penjabaran perencanaan pertahun untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Rencana Strategis ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kinerja SKPD dalam mendukung kinerja pemerintah daerah melaksanakan pembangunan.

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029, sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang akan diurai dalam bab ini.

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan berbagai pemangku kepentingan dan menjawab tuntutan perkembangan situasi saat ini baik tingkat regional maupun nasional serta secara global.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, strategi dan kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan indikator kinerja sasaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai sarana pencapaian.

II.2 Visi dan Misi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tekad melanjutkan pembangunan Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan melalui RPJMD tahun 2025 – 2029 berVISI mewujudkan **“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”**, dengan 7 (tujuh) MISI antara lain :

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
- 2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 3) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Mempeluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
- 6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
- 7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dukungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada pencapaian VISI MISI RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, terutama pada upaya pencapaian MISI Kedua dalam rangka “Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka

ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat “.

II.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi untuk mendukung misi kelima Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan adalah : **Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Meningkatnya Ekspor Barang.
2. Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan melalui program-program disektor perdagangan. Secara keseluruhan perumusannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Tujuan – Sasaran – Indikator – Target Kinerja
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20
		1. Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52

		2	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64
--	--	---	--	---	------	------	------	------	------

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Selatan 2025-2045, selanjutnya menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan selanjutnya menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029.

Rencana Kinerja Tahun 2025

Penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja (performance plan) tersebut dalam bentuk target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan pada proses pengukuran keberhasilan setiap periode pelaksanaan. Rencana kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,92
		1. Meningkatkan Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	%	21,26
		2. Meningkatkan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7,13

II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,92
2	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	%	21,26
3	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7,13

Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Sakip Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	80,12	12.144.024.617
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	100%	162.272.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90.642.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	56.630.000
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	100%	10.174.287.000
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 orang	9.494.674.000
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	440.813.000
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	238.800.000
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	100%	13.080.000
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13.080.000
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	100%	718.790.200
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	25.000.000
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.335.000

	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	55.000.0000
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3650 Exemplar	15.000.000
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	515.455.200
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	100%	462.164.660
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.000.000
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	393.164.660
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	57.000.000
	Viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%	613.430.757
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	180 Unit/Tahun (R4=11 unit, R2= 4 unit)	330.128.000
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	83.302.757
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung	200.000.000
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Tingkat Kemudahan Perizinan Usaha Perdagangan	100%	34.248.400
	I	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	100%	34.248.400
	22	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	34.248.400
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 1 (satu) sarana perdagangan ber-SNI	90%	2.422.130.400

	I	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	90%	2.422.130.400
	23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	452 Unit	2.112.000.000
		Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	209.056.000
		Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang berpartisipasi	50 orang	101.074.400
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Pedagang	418.806.800
	I	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,13%	380.552.000
	24	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	12 laporan	93.152.000
	25	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	287.400.000
	II	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90%	38.254.800
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	38.254.800

V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Tingkat Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Eksportir	2,5 - 5%	554.156.243
	I	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekspor baru setiap tahun	5%	554.56.243
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	339.996.243
	27	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	214.160.000
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Pengaduan Penanganan Konsumen	90%	711.886.414
	I	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang difasilitasi	90%	339.838.714
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	339.838.714
	II	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	232.245.200
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	100.891.200
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 Laporan	131.354.000
	III	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	70%	139.802.500
	32	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	12 Laporan	139.802.500
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Peningkatan Jenis Produk Ekspor	100%	122.500.000

	I	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	5 UMKM	122.500.000
		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	5 UMKM	122.500.000
Jumlah					16.407.752.874

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian IKU

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis diperoleh capaian kinerja tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB merupakan total nilai tambah dari seluruh kegiatan perdagangan (besar dan eceran) dalam suatu periode tertentu (biasanya pertahun) yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang kemudian dibandingkan dengan total nilai PDRB wilayah tersebut.

Dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB}}{\text{PDRB}} = \frac{\text{PDRB sektor Perdagangan}}{\text{PDRB Total Wilayah}} \times 100\%$$

- b. Ekspor barang dan Jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional yang mana Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen yang mana Ekspor Barang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan sedangkan untuk Ekspor Jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

Dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa (\%PDB)}}{\text{PDB ADHK}} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDB ADHK}} \times 100\%$$

- c. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi merupakan Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diantara Kabupaten/Kota di dalam satu Provinsi.

Dengan rumus perhitungan :

$$\text{Rata-rata Koefisien Variasi} = \frac{\text{Standar Deviasi Harga Rata-rata}}{\text{Rata-rata Harga}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13.85	13.92	13.99	14.06	14.13	14.20	14.27	
2	Ekspor barang dan jasa	%	16.84	21.26	21.58	21.89	22.21	22.52	22.84	
3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	6.13	7,13	7,00	6.88	6.76	6,64	6.52	

Tabel 9.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Tahun)			Realisasi (Tahun)			Rasio Capaian (Tahun)		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5			6			7 (6/5*100)		
1	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,47-14,00	13,85	13,92	13,45	13,85	14,30	99,85	99,57	102,73
2	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	%	10,2-10,4	16,84	21,26	26,24	24,26	21,77	257,25	144,06	102,39
3	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	≤ 5	≤ 5	7,13	4,7	6,13	1,55	106	81,6	460

2. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 telah mencapai targetnya. Tetapi ada beberapa indikator yang belum bisa tercapai yaitu Ekspor Barang dan Jasa dengan realisasi 9,13% dan capaian 42,94%.

Tabel 10.
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5 x 100)
1	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	101,51	13,92	729,24
2	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	42,94	21,26	201,98
3	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	21,74	7,13	304,91

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Berikut disajikan tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi :

Tabel 11.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,92	14,13	101,51	Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer	Hilirisasi produk unggulan daerah
2	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	21,26	9,13	42,94	Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer	Hilirisasi produk unggulan daerah
3	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,13	1,55	21,74	Kerjasama Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam mengatasi gejolak harga	Tetap koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait

	Barang Strategis						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

- **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tabel 12.
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Keuangan	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa	21,26%	9,13%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Jumlah Ekspor baru setiap tahun		
					Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	98,65%	Menunjang
					Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	99,95%	Menunjang
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat Kemudahan Perizinan Usaha Perdagangan		
					Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	92,53%	Menunjang
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jenis Produk Ekspor		Menunjang
					Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk Dalam Negeri	93,42%	Menunjang
2	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,13%	1,4%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 1 (satu) sarana perdagangan ber-SNI		Menunjang

					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	99,56%	Menunjang
					Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggara n Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	96,69%	Menunjang
					Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang berpartisipasi	98,86%	Menunjang
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)		Menunjang
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	96,18%	Menunjang
					Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99,29%	Menunjang
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	93,75%	Menunjang
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen		Menunjang

				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1. Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	88,03%	Menunjang
				Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	95,52%	Menunjang
				Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	98,62%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	98,21%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

• Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD Tahun 2025

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan APBD Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik. Untuk Tahun 2025 pagu dana Belanja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 16.407.752.874,- yang terdiri dari 7 Program dan 15 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan. Realisasi Keuangan Belanja Langsung Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.407.752.874,- atau 92,74% dan realisasi fisik 95,76%.

Tabel 13.
Capaian Anggaran Program Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.144.024.617	11.042.856.048	1.101.168.569	96,58	96,62

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.272.000	152.701.607	9.570.393	95,97	96,01
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.642.000	83.261.400	7.380.600	91,86	91,86
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.980.000	20.000	99,87	100
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	56.630.000	54.460.207	2.169.793	96,17	96,17
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.174.287.000	9.157.736.907	1.016.550.093	92,11	92,15
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.494.674.000	8.510.143.907	984.530.093	89,63	89,63
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	440.813.000	440.273.000	540.000	99,88	100
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	238.800.000	207.320.000	31.480.000	86,82	86,82
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.080.000	13.010.000	70.000	99,46	99,46
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.080.000	13.010.000	70.000	99,46	99,46
	iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.790.200	713.961.885	4.828.315	99,78	99,81
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	0	100	100
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.335.000	108.333.000	2.000	100	100
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	54.984.000	16.000	99,97	100
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.982.000	18.000	99,88	100
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.455.200	510.662.885	4.792.315	99,07	99,017
	v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.164.660	403.413.723	58.750.937	93,30	93,41
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.960.000	40.000	99,67	100
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.164.660	337.668.723	55.495.937	85,88	85,88

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000	53.785.000	3.215.000	94,36	94,36
	vi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.430.757	602.031.926	11.398.831	98,83	98,88
	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.128.000	319.005.976	11.122.024	96,63	96,63
	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.302.757	83.275.950	26.807	99,97	100
	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.750.000	250.000	99,88	100
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		34.248.400	31.690.000	2.558.400	92,53	92,53
	vii	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	34.248.400	31.690.000	2.558.400	92,53	92,53
	19	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	34.248.400	31.690.000	2.558.400	92,53	92,53
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		2.422.130.400	2.404.849.108	17.281.292	98,37	98,37
	viii	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	2.422.130.400	2.404.849.108	17.281.292	98,37	98,37
	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	2.112.000.000	2.102.780.000	9.220.000	99,56	99,56
	21	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	209.056.000	202.145.297	6.910.703	96,69	96,69
	22	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	101.074.400	99.923.811	1.150.589	98,86	98,86
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		418.806.800	410.809.028	7.997.772	95,74	95,74

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
	ix	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	380.552.000	374.943.500	5.608.500	97,74	97,74
	23	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	93.152.000	89.593.500	3.558.500	96,18	96,18
	24	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	287.400.000	285.350.000	2.050.000	99,29	99,92
	x	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	38.254.800	35.865.528	2.389.272	93,75	93,75
	25	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	38.254.800	35.865.528	2.389.272	93,75	93,75
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		554.156.243	549.016.908	5.139.335	99,24	99,24
	xi	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	554.156.243	5549.016.908	5.139.335	99,24	99,24
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	339.996.243	334.956.908	5.039.335	98,52	98,52
	27	Pameran Dagang Lokal	214.160.000	214.060.000	100.000	99,95	99,95

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		711.886.414	662.389.404	49.497.010	94,44	94,44
	xii	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	339.838.714	299.166.012	40.672.702	88,03	88,03
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	339.838.714	299.166.012	40.672.702	88,03	88,03
	xiii	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	232.245.200	225.916.854	6.328.346	97,07	97,07
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	100.891.200	96.374.044	4.517.156	95,52	95,52
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	131.354.000	129.542.810	1.811.190	98,62	98,62
	xiv	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	139.802.500	137.306.538	2.495.962	98,21	98,21
	31	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	139.802.500	137.306.538	2.495.962	98,21	98,21
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		122.500.000	114.435.127	8.064.873	93,42	93,42
	xv	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	122.500.000	114.435.127	8.064.873	93,42	93,42
	32	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	122.500.000	114.435.127	8.064.873	93,42	93,42
		Jumlah	16.407.752.874	15.216.045.623	1.191.707.251	92,74	95,76

Rincian realisasi per program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Dana	:	Rp. 90.642.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.01.01
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Hasil	:	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Kinerja	:	1 laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 55.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 91,86% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.261.400,- atau 91,86% dengan sisa pagu anggaran Rp. 7.380.600,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Se-Sumatera Selatan sebanyak 1 kali.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 15.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.01.06
Keluaran	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil	:	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

		SKPD
Target Kinerja	:	3 laporan (LKjIP, LPPD, LKPJ)

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp. 15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.980.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 20.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	3
Nama Sub Kegiatan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Dana	:	Rp. 56.630.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.01.07
Keluaran	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil	:	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Kinerja	:	1 laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 56.630.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,17% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.460.207,- atau 96,17% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.169.793,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sarana prasarana perdagangan tahun 2025 ke Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**➤ Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	4
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Dana	:	Rp. 9.494.674.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.02.01
Keluaran	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil	:	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Target Kinerja	:	149 orang/bulan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu Rp. 9.494.674.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 89,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.510.143.907,- atau 89,63 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 984.530.093,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 149 orang selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	5
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pagu Dana	:	Rp. 440.813.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.02.02
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Hasil	:	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target Kinerja	:	1 dokumen

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu Rp. 440.813.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 440.273.000,- atau 99,88% dengan sisa pagu anggaran Rp. 540.000,-. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa tenaga honorer selama bulan Januari s.d Desember 2025.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	6
Nama Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 238.800.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.02.03
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Hasil	:	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Target Kinerja	:	12 dokumen

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu Rp. 238.800.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 86,82% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 207.320.000,- atau 86,82% dengan sisa pagu anggaran Rp. 31.480.000,-. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan selama bulan Januari s.d Desember 2025.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	7
Nama Sub Kegiatan	:	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 13.080.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.03.06

Keluaran	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Hasil	:	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu Rp. 13.080.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,46% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.080.000,- atau 99,46% dengan sisa pagu anggaran Rp. 70.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	9
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Dana	:	Rp. 25.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.01
Keluaran	:	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Target Kinerja	:	4 paket

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu Rp. 25.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 Paket komponen instalasi listrik/penerangan untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2025.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	10
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Dana	:	Rp. 108.335.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.04
Keluaran	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Target Kinerja	:	4 paket

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu Rp. 108.335.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 108.333.000,- atau 100%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 paket alat tulis kantor dan alat kebersihan dan bahan pembersih selama bulan Januari s.d Desember 2025.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	11
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Dana	:	Rp. 55.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.05
Keluaran	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Target Kinerja	:	4 paket

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu Rp. 55.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 54.984.000,- atau 99,97%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 paket barang cetakan dan penggandaan selama bulan Januari s.d Desember 2025.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	12
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
Pagu Dana	:	Rp. 15.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.06
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Target Kinerja	:	3.650 dokumen

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu Rp.15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.982.000,- atau 99,88%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 18.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan selama bulan Januari s.d Desember 2025.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	13
Nama Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 515.455.200,-

Lokasi	:	Dalam dan Luar Provinsi
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.09
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Hasil	:	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Rp. 515.455.200,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 99,07% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 510.662.885,- atau 99,07%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.792.315,- Hasil yang dicapai terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2025.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	18
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Dana	:	Rp. 12.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.08.01
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu Rp. 12.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.960.000,- atau 99,67% dengan sisa pagu anggaran Rp. 40.000,- Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama bulan Januari s.d Desember 2025;

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	19
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Dana	:	Rp. 393.164.660,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.08.02
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Rp. 393.164.660,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 85,88% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 337.668.723,- atau 85,88% dengan sisa pagu anggaran Rp. 55.495.937,-. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa telepon, air, listrik, internet selama bulan Januari s.d Desember 2025.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	20
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Dana	:	Rp. 70.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.08.04
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu Rp. 57.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 94,36% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.785.000,- atau 94,36% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.215.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama bulan Januari s.d Desember 2025.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	21
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Dana	:	Rp. 330.128.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.09.01
Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Hasil	:	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Target Kinerja	:	144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit / bulan)

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu Rp. 330.128.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 319.005.976,- atau 96,63% dengan sisa pagu anggaran Rp. 11.122.024,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 13 unit kendaraan dinas roda empat dan 5 unit kendaraan dinas roda dua selama bulan Januari s.d Desember 2025;

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	22
Nama Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Dana	:	Rp. 83.302.757,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.09.06
Keluaran	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Hasil	:	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Target Kinerja	:	50 unit

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp. 83.302.757,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.275.950,- atau 99,97% dengan sisa pagu anggaran Rp. 26.807,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin selama bulan Januari s.d Desember 2025;

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	23
Nama Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Dana	:	Rp. 200.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.09.09
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Hasil	:	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Target Kinerja	:	1 gedung

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.750.000,- atau 99,88% dengan sisa pagu anggaran Rp. 250.000,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor Dinas Perdagangan.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Pagu Dana	:	Rp. 34.248.400,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.02.1.03.03
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Hasil	:	Tersedianya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dengan pagu Rp. 34.248.400,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 92,53% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.690.000,- atau 92,53% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.558.400,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya sebanyak 1 laporan

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Pagu Dana	:	Rp. 2.112.000.000,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.03.1.01.01
Keluaran	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Hasil	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Target Kinerja	:	1200 unit

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp. 2.112.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,56% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.102.780.000,- atau 99,56% dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.220.000,-. Hasil yang dicapai adalah 1.812 Unit bantuan sarana dan prasarana perdagangan berupa Etalase sebanyak 500 unit, Booth Portable sebanyak 100 unit, Tenda sebanyak 600 unit dan Facum Sealer sebanyak 612 unit.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Pagu Dana	:	Rp. 209.056.000,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.03.1.01.02
Keluaran	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi

		Provinsi
Hasil	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Target Kinerja	:	1200 unit

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp. 209.056.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,69% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 202.145.297,- atau 99,69% dengan sisa pagu anggaran Rp. 6.910.703,-. Hasil yang dicapai Pasar ber-SNI di Pasar Simpang Periuk Kota Lubuk Linggau.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	3
Nama Sub Kegiatan	:	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
Pagu Dana	:	Rp. 101.074.400,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.03.1.01.03
Keluaran	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Hasil	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Target Kinerja	:	1200 unit

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dengan pagu Rp. 101.074.400,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,86% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.923.811,- atau 98,86% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.150.589,-. Hasil yang dicapai Temu Bisnis antar Pelaku Usaha di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

4. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Pagu Dana	:	Rp. 93.152.000,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.04.1.02.01
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Hasil	:	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Target Kinerja	:	12 laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota dengan pagu Rp. 93.152.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,18% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.583.500,- atau 96,18% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.558.500,-. Hasil yang dicapai laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting bulan Januari s/d Desember 2025.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan	:	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pagu Dana	:	Rp. 287.400.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.04.1.02.02
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Hasil	:	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Target Kinerja	:	6 laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 287.400.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,29% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 285.350.000,- atau 99,29% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.050.000,- . Hasil yang dicapai terlaksananya operasi pasar sebanyak 14 kali.

b. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kerjanya

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
Pagu Dana	:	Rp. 93.152.000,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.04.1.03.03
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi minimal 90%
Hasil	:	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi minimal 90%

Target Kinerja	:	1 laporan
----------------	---	-----------

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan pagu Rp. 38.254.800,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 93,75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.865.528,- atau 93,75% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.389.272,-. Hasil yang dicapai laporan hasil pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi bulan Januari s/d Desember 2025.

5. Program Pengembangan Ekspor

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pameran Dagang Internasional / Nasional
Pagu Dana	:	Rp. 339.996.243,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.05.1.01.01
Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
Hasil	:	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/ Nasional
Target Kinerja	:	2 kali

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pameran Dagang Internasional / Nasional dengan pagu Rp. 339.996.243,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 334.956.908,- atau 98,52% dengan sisa pagu anggaran Rp. 5.039.335,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pameran sebanyak 3 kali di Jakarta (pameran TEI dan Bitatex Expo 2025), Malang Spektra Fair di Jawa Timur.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan	:	Pameran Dagang Lokal
Pagu Dana	:	Rp. 214.160.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.05.1.01.02
Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal
Hasil	:	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal
Target Kinerja	:	3 pelaku usaha

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pameran Dagang Lokal dengan pagu Rp. 214.160.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,95% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 214.060.000,- atau 99,95% dengan sisa pagu anggaran Rp. 100.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pameran Sriwijaya Expo di Palembang, Pameran Wastra di Palembang, Festival Rempah di Palembang, Pameran Produk Unggulan SUMSEL di The Sultan Convention Center.

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang**➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
Pagu Dana	:	Rp. 339.838.714,-
Lokasi	:	Palembang, Lubuk Linggau
Kode Rekening	:	3.30.06.1.01.01
Keluaran	:	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif
Hasil	:	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Target Kinerja	:	2 BPSK
----------------	---	--------

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 339.838.714,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini 88,03% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 299.166.012,- atau 88,03% dengan sisa pagu anggaran Rp. 40.672.702,-. Hasil yang dicapai terfasilitasinya 2 BPSK dan terlaksananya edukasi konsumen cerdas kepada 100 orang.

b. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pengembangan Layanan Kalibrasi
Pagu Dana	:	Rp. 100.891.200,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.06.1.02.03
Keluaran	:	Jumlah Sertifikat Kalibrasi Produk yang Diterbitkan
Hasil	:	Meningkatnya layanan kalibrasi
Target Kinerja	:	1 dokumen

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengembangan Layanan Kalibrasi dengan pagu Rp. 100.891.200,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 95,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.374.044,- atau 95,52% dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.517.156,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan pengembangan layanan kalibrasi.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan	:	Pengembangan Layanan Pengujian
Pagu Dana	:	Rp. 131.354.000,-

Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.06.1.02.03
Keluaran	:	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan
Hasil	:	Meningkatnya layanan sertifikasi
Target Kinerja	:	1 sertifikat

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengembangan Layanan Pengujian dengan pagu Rp. 131.354.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,62% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.542.810,- atau 98,62% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.811.190,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan untuk sertifikasi laboratorium pengujian mutu yang terakreditasi oleh KAN sebanyak 1 dokumen.

c. Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
Pagu Dana	:	Rp. 139.802.500,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.06.1.03.01
Keluaran	:	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi
Hasil	:	Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 139.802.500,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,21% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 137.306.538,- atau 98,21% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.495.962,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen selama bulan Januari s.d Desember 2025.

7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
Pagu Dana	:	Rp. 122.500.000,-
Lokasi	:	Surabaya Jawa Timur
Kode Rekening	:	3.30.07.1.01.02
Keluaran	:	Jumah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri
Hasil	:	Jumah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri
Target Kinerja	:	10 UMKM

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dengan pagu Rp. 122.500.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini 93,42% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.435.127,- atau 93,42% dengan sisa pagu anggaran Rp. 8.064.873,-. Hasil yang dicapai

terfasilitasinya 10 UMKM dalam kegiatan Misi Dagang di Surabaya, Jawa Timur.

Sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : PR.03.00/39/PDN.1/SD/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Efisiensi Anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan TA. 2025, Pagu Anggaran Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,-.

- **Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun 2025 Dibandingkan Tahun 2024**

Untuk tahun anggaran 2025 ini pagu Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah Rp. 16.407.752.874,-. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 15.215.995.623,- atau 92,74% dan realisasi fisik 95,76%, dimana rincian realisasi per bulan dapat dilihat pada tabel dengan perbandingan realisasi anggaran di tahun 2024 lalu sebagai berikut :

Tabel 14.

Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 dan 2025

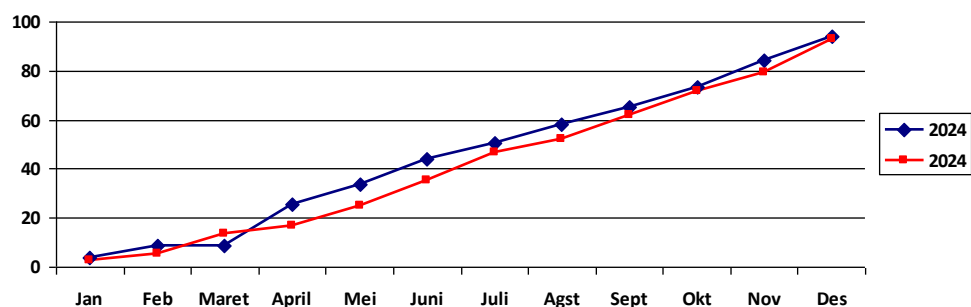
Bulan	Realisasi Keuangan dan Fisik			
	2024	2025	2024	2025
	Keuangan %	Keuangan %	Fisik %	Fisik %
Januari	3,55	2,70	5,14	4,70
Februari	8,84	5,68	22,43	9,41
Maret	8,84	13,75	22,43	19,01
April	25,81	16,69	31,59	25,00
Mei	33,71	24,85	43,33	37,11
Juni	44,14	35,39	45,37	44,83
Juli	50,58	46,61	58,70	52,92
Agustus	58,14	52,19	62,28	68,33
September	65,30	61,89	73,62	75,48
Oktober	73,51	71,78	75,71	86,58
Nopember	84,18	79,51	90,58	87,07

Desember	94,15	92,74	94,70	95,76
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

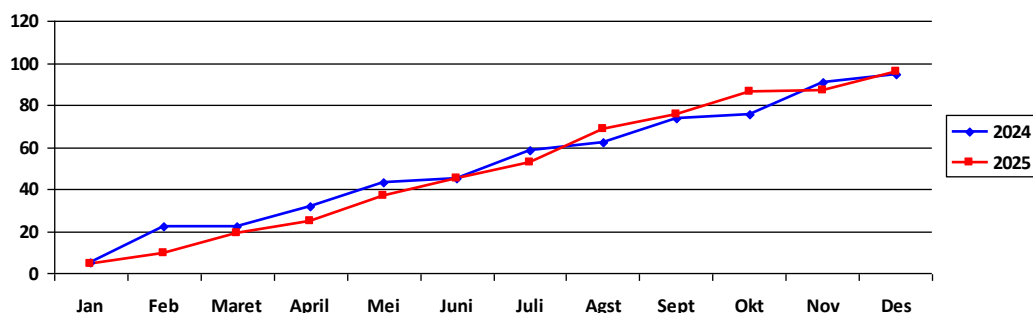
Realisasi keuangan pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,41 %, sedangkan untuk realisasi fisik pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1,06 %.

Grafik perbandingan realisasi belanja Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4. Grafik Realisasi Keuangan Tahun 2024 dan 2025



Gambar 5. Grafik Realisasi Fisik Tahun 2024 dan 2025



• Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat efisiensi dan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran dan anggaran program dan kegiatan.

Tabel 15.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	13,92	14,13	101,51	554.156.243	549.016.908	99,07
2	Meningkatnya Ekspor Barang	21,26	9,13	42,94	554.156.243	549.016.908	99,07
3	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	7,13	1,55	21,74	380.552.000	374.943.500	98,53

Tabel 16.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		80,12 Nilai Sakip Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	80,12 Nilai Sakip Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	100	12.144.024.617	11.042.806.048	90,93	9,07
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang	100% Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang	100	162.272.000	152.701.607	94,10	5,9
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100	90.642.000	83.261.400	91,86	8,14

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan (LPPD, LKPJ, LKIP)	3 Laporan (LPPD, LKPJ, LKIP)	100	15.000.000	14.980.000	99,87	0,13
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	56.630.000	54.460.207	96,17	3,83
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% Administrasi Keuangan yang Terlayani	100% Administrasi Keuangan yang Terlayani	100	10.174.287.000	9.157.736.907	90,01	9,99
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang	150 orang	100	9.494.674.000	8.510.143.907	89,63	10,37
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	440.813.000	440.273.000	99,88	0,12
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	238.800.000	207.320.000	86,82%	13,18
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100% Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	100% Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	100	13.080.000	13.010.000	99,46	3,54
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	13.080.000	13.010.000	99,46	3,54
	iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	100% Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	100	718.790.200	713.961.885	99,33	0,67
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	25.000.000	25.000.000	100	0
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	108.335.000	108.333.000	99,99	0,01
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket Barang Cetak dan Penggandaan	100	55.000.000	54.984.000	99,97	0,03
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen Bahan Bacaan	12 dokumen Bahan Bacaan	100	15.000.000	14.982.000	99,88	0,12
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	515.455.200	510.562.885	99,05	0,95
	V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	100% Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	100	462.164.660	403.363.273	87,28	12,72

	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12.000.000	11.910.000	99,25	0,75
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	393.164.660	337.668.723	85,88	14,12
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Pelayanan Umum Kantor	100	57.000.000	53.785.000	94,36	5,64
	Vi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100	613.430.757	602.031.926	98,14	1,86
	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	330.128.000	319.005.976	96,63	3,37
	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	83.302.757	83.275.950	99,97	0,03
	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	200.000.000	199.750.000	99,87	0,13
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		100% Tingkat Kemudahan Perizinan Usaha Perdagangan	100% Tingkat Kemudahan Perizinan Usaha Perdagangan	100	34.248.400	31.690.000	92,53%	7,47
	Vii	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	100% Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	50 pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	100	34.248.400	31.690.000	92,53%	7,47
	19	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	100	34.248.400	31.690.000	92,53%	7,47
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		90% Kab/Kota yang memiliki minimal 1 (satu) sarana perdagangan ber-SNI	90% Kab/Kota yang memiliki minimal 1 (satu) sarana perdagangan ber-SNI	100	2.422.130.400	2.404.849.108	99,29	0,71
	Vii i	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1200 unit sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	1812 unit sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100	2.422.130.400	2.404.849.108	99,29	0,71
	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	1200 unit sarana dan prasarana Perdagangan bagi UMKM	1812 unit sarana dan prasarana Perdagangan bagi UMKM	100	2.112.000.000	2.102.780.000	99,56	0,44

	21	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan Pasar yang menjadi Pasar SNI	1 Laporan Pasar yang menjadi Pasar SNI	100	209.056.000	202.145.297	96,69	3,31
	22	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	50 orang Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	50 orang Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	100	101.074.400	99.923.811	98,86	1,14
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	100	418.806.800	410.809.028	98,09	1,91
	ix	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7,13% Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ≤5%	100	380.552.000	374.943.500	98,53	1,47
	23	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	12 Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	100	93.152.000	89.593.500	96,18	3,82
	24	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok	6 Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok	100	287.400.000	285.350.000	99,29	0,71
	X	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya	90% Kinerja Realisasi Pupuk	90% Kinerja Realisasi Pupuk	100	38.254.800	35.865.528	93,75	6,25
	25	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	1 Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	1 Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	100	38.254.800	35.865.528	93,75	6,25
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Tingkat Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Eksportir =2,5%-5%	Tingkat Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Eksportir =2,5%-5%	100	554.156.243	549.016.908	99,07	0,93

	Xi	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	5% Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekspor baru setiap tahun	5% Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekspor baru setiap tahun	100	554.156.243	549.016.908	99,07	0,93
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	5 Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	100	339.996.243	334.956.908	98,52	1,48
	27	Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	100	214.160.000	214.060.000	99,95	0,05
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		90% Penanganan Pengaduan Konsumen	90% Penanganan Pengaduan Konsumen	100	711.886.414	662.389.404	93,05	6,95
	xii	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	90% Pengaduan Konsumen yang difasilitasi	90% Pengaduan Konsumen yang difasilitasi	100	339.838.714	299.166.012	88,03	11,97
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1. 2 BPSK difasilitasi 2. 100 peserta Edukasi Konsumen	1. 2 BPSK difasilitasi 2. 100 peserta Edukasi Konsumen	100	339.838.714	299.166.012	88,03	11,97
	xiii	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100% komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100% komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	232.245.200	225.916.854	97,27	2,73
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1 Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	100	100.891.200	96.374.044	95,52	4,48
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	1 Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	100	131.354.000	129.542.810	98,62	1,38
	xiv	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	70% Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	70% Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	100	139.802.500	137.306.538	98,21	1,79
	31	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1 Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	1 Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	100	139.802.500	137.306.538	98,21	1,79
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		100% Peningkatan Jenis Produk Ekspor	100% Peningkatan Jenis Produk Ekspor	100	122.500.000	114.435.127	93,42	6,58

	Xv	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	10 UMKM Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	10 UMKM Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	100	122.500.000	114.435.127	93,42	6,58
	32	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	10 UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	10 UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	100	122.500.000	114.435.127	93,42	6,58
Jumlah : 32 sub kegiatan					100	16.407.752.874	15.215.995.623	92,73	7,27

BAB IV

P E N U T U P

IV.1 KESIMPULAN

Dari semua yang telah diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2025 berlangsung baik dengan realisasi keuangan mencapai 92,74% dan secara fisik mencapai 95,76%. Pelaksanaan kinerja keuangan program kegiatan tahun 2025 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 lalu yang mencapai 94,15% untuk realisasi keuangan. Untuk realisasi fisik mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 94,70%.
2. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui pencapaian beberapa indikator kinerja secara umum cukup baik.
3. Dalam pencapaian visi dan misi SKPD yang tertuang dalam tujuan-sasaran-strategi-kebijakan dan indikator kinerja yang ditetapkan serta implementasinya dalam bentuk program kegiatan sudah berjalan cukup baik sepanjang tahun 2025, dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan antara lain :
 - Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa (PBBJ) dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan konsumen.
 - Memantau perkembangan harga, ketersediaan stock dan distribusi barang kebutuhan pokok maupun strategis di Kabupaten/Kota.
 - Meningkatkan pelayanan pengujian dan pengawasan standar mutu menambah laboratorium pengujian sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta merekrut SDM untuk pengujian mutu barang.
 - Melakukan upaya peningkatan ekspor terutama komoditi unggulan daerah, upaya pengendalian impor serta menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri.

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya menarik minat investor untuk berusaha (menanamkan investasi) dibidang perdagangan.

IV.2 SARAN

Dari semua yang telah diuraikan didalam LKjIP Tahun 2025, beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Penanganan permasalahan yang ada disektor Perdagangan memerlukan koordinasi dan perencanaan yang baik, efektif dan realitis dengan didukung data yang akurat serta komitmen dari pimpinan dan seluruh komponen yang ada didalam SKPD.
2. Perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM/aparatur Dinas Perdagangan agar dapat memenuhi/menjalankan tuposinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Evaluasi terhadap struktur organisasi dan komposisi aparatur didalam organisasi perlu dilakukan, mengingat bahwa penempatan aparatur yang tepat pada posisi-posisi yang tepat dan strategis sangat menentukan hasil pencapaian kinerja dan pelayanan SKPD.

Akhirnya semoga apa yang telah diuraikan dalam LKjIP tahun 2025 ini dapat menggambarkan apa yang menjadi harapan dari tujuan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang Kode Pos 30139 Telp (0711) 310447 Fax. (0711) 5641111
Email : disdag@sumselprov.go.id dan umum.disdagsumsel@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henny Yulianti
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang,

2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan,

Henny Yulianti
Pembina Tingkat I - (IV/b)
NIP. 197907082006042005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13.92
2	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	21.26
3	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7.13

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12,144,024,617	APBD
2. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 34,248,400	APBD
3. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2,422,130,400	APBD
4. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 419,006,800	APBD
5. Pengembangan Ekspor	Rp. 554,156,243	APBD
6. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 711,886,414	APBD
7. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 122,500,000	APBD

Palembang,

2025

Gubernur Sumatera Selatan,



Herman Deru

Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan,

Henny Yulianti
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197907082006042005